

SKRIPSI



**HAK PENAMBANGAN PASIR OLEH MASYARAKAT
LOKAL DI KECAMATAN PATTALLASSANG
KABUTAPEN TAKALAR**

**OLEH
AYATUL ASMAUL HUSNA
B111 08 392**

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**HAK PENAMBANGAN PASIR OLEH MASYARAKAT LOKAL
DI KECAMATAN PATTALLASSANG
KABUTAPEN TAKALAR**

Oleh :

**AYATUL ASMAUL HUSNA
B111 08 392**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Dalam Program Studi Ilmu Hukum

**BAGIAN KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

HAK PENAMBANGAN PASIR OLEH MASYARAKAT LOKAL DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR

Disusun dan diajukan oleh

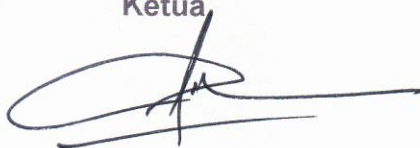
AYATUL ASMAUL HUSNA

B 111 08 392

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi program sarjana
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 5 Maret 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

NIP. 19671231 199103 2 003

Sekretaris



Kahar Lahae, S.H., M.H.

NIP. 19661231 199002 1 001

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Ayatul Asmaul Husna

Nomor Pokok : B111 08 392

Bagian : Hukum Keperdataan

Judul : Hak Penambangan Pasir Oleh Masyarakat Lokal di
Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

Pembimbing II



Kahar Lahae, S.H., M.H.
NIP. 19661231 199002 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUPH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AYATUL ASMAUL HUSNA
No. Pokok : B111 08 392
B a g i a n : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Hak Penambangan Pasir oleh Masyarakat Lokal di
Kecamatan Patalassang Kabupaten Takalar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

AYATUL ASMAUL HUSNA (B111 08 392) “Hak Penambangan Pasir oleh Masyarakat Lokal di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar” (dibimbing oleh Ibu Farida Patittingi sebagai pembimbing I dan Bapak Kahar Lahae sebagai pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dasar hukum masyarakat lokal dalam melakukan kegiatan penambangan pasir, mengetahui persepsi/pandangan masyarakat setempat terhadap kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar dan mengetahui kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Takalar, tepatnya di Kecamatan Pattallassang, dengan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yakni metode penelitian kepustakaan dan lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi di lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data skunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Dasar hukum penguasaan oleh masyarakat lokal atas kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di Kecamatan Pattallassang yakni penguasaan secara fisik yang terjadi secara alamiah dan turun temurun. Akan tetapi, dasar hukum penguasaan secara fisik saja tidaklah cukup untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dalam hal ini masyarakat yang melakukan penambangan pasir harus mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan oleh pemerintah setempat seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Harapan masyarakat di sekitar lokasi penambangan pasir yakni kegiatan penambangan pasir tersebut dapat segera dihentikan dan ditindak tegas oleh pemerintah setempat, sebab dari sisi lingkungan hidup sangat merugikan. Pemerintah Kabupaten Takalar kurang tegas dalam menerapkan aturan-aturan yang dibuatnya. Hal ini disebabkan karena para penambang pasir merupakan masyarakat ekonomi lemah dan hasil dari kegiatan menambang pasir itu sendiri masih sangat minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga terjadi pembiaran oleh pemerintah setempat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan lahir dan bathin berlimbung kepada-Nya serta bertawaqal kepada-Nya dengan jalan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat sehat dan rezeki sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Samsuddin, S.T dan Ibunda Kartini yang senantiasa selalu memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kakak Penulis yakni Hajrul aswadi, terimakasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Adapun tujuan penulis menyusun skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mengikuti Ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Disamping itu juga dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait yang ada relevansinya dengan pokok materi pembahasan serta sebagai penambah khasanah dan wawasan pengetahuan pada ilmu-ilmu hukum.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari dari setiap kata-kata yang penulis tuangkan dalam penulisan ini jelas terlihat adanya banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun dari segi teknik penulisannya yang disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki.

Sejak awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengalami banyak hambatan, namun berkat kerja keras, kesungguhan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun dari segi moril, sehingga terwujudlah skripsi yang sederhana ini.

Atas segala bantuan tersebut, sebagai tanda rasa syukur dan terimakasih, melalui kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus yang setinggi-tingginya atas budi jasa yang tiada ternilai, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap seluruh jajarannya
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Kahar Lahae, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu memberikan bimbingan dan nasihat, memberikan ilmu, saran dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.F.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yunus Wahid, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H.,

selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yunus Wahid, S.H., M.Hum., selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Keperdataan dan Ibu Dr. Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku sekretaris bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Maha Guru dan para dosen kami yang tiada lelah memberikan ilmunya guna peningkatan kadar keilmuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas hasanuddin.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terimakasih atas bantuan dan fasilitas yang diberikan selama ini.
9. Keluarga Besar Djamaluddin Dg. Sikki dan Ibunda Aeni serta anak-anaknya Rahma, Putri, Iwan serta Keluarga Besar Muhammad Nur Dg.Tawang terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, kebersamaan serta memberikan keluarga baru bagi penulis selama berada di lokasi penelitian.

10. Kepala Kecamatan Pattalassang beserta seluruh stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di kantor daerahnya serta membantu saat penelitian.
11. Buat sahabatku dari kecil dan juga adalah saudaraku Irmayanti Muslim, S.Kep. yang senantiasa membantu dalam suka maupun duka dan memberikan motivasi kepada penulis hingga saat ini.
12. Keluarga Kecil Persaudaraan “Setia Hati Terate” Komisariat Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis terimakasih sodaraku, Salam Persaudaraan 1922!!!
13. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Pencak Silat Universitas Hasanuddin yang memberikan banyak pengalaman, prestasi dan semangat kepada penulis.
14. Buat Gengges HMBBG Aprillia Zulkarnaen, Siti Haryati, Andi Nurfaizah AT, Syahrifilani Saggaf dan Hiksyani Nurkhadijah yang senantiasa menemani hingga akhir perjuangan, terimakasih gadis-gadisku atas kebersamaan canda, tawa, cerita yang kalian berikan selama ini.
15. Kawan-kawan KKN Reguler Gelombang 80 Kecamatan Pol-Sel dan terkhusus Kelurahan Pa’bundukang, Ruslianto Djalatim, S.T., Aprillia Zulkarnaen, Safwasiq, S.Pi, Syaiful Aziz, Budhi Karoma, S.Ked, Fauzan Faiz, S.E, Nur Istiqamah, S.T.

16. Sahabat-sahabatku Dwika Nawan Sari, S.H, Rezki Fatima Lolok, S.H, Nurliyanti, S.H, Aulia Aryndi Putri, Febriyana Irianjah, S.H, Fermayanti Annas, lin Wahyu Priani, S.H, rezky Amalia Herry, S.H, dan d'saZhy SMUNEL yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis

17. Teruntuk sodara terdekatku Musliyadi, S.H yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis.

18. Buat kawan-kawan NOTARIS '08 dan Declazz Law08 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terimakasih. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis. Namun melalui doa dan harapan dari penulis semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah SWT. Amin

Makassar, Februari 2013

Penulis

AYATUL ASMAUL HUSNA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Pertambangan	12
1. Pengertian Hukum Pertambangan	12
2. Asas-Asas Hukum Pertambangan	13
3. Aspek Hukum Pertambangan Rakyat	15
4. Pertambangan Pasir	23
B. Tinjauan Umum Penggunaan Tanah Untuk Kepentingan Usaha Pertambangan	28
1. Prinsip Hukum Agraria	29
2. Hak Atas Pertambangan	33

3. Hubungan Antara Hukum Pertambangan dan Hukum Agraria	33
C. Tinjauan Umum Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup	34
1. Hubungan Hukum Pertambangan dengan Hukum Lingkungan	34
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	41
D. Penegakan Hukum dalam Kegiatan Pertambangan	43
1. Perizinan dalam Kegiatan Pertambangan	43
2. Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Pertambangan	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	51
B. Teknik Pengumpulan Data	51
C. Teknik Metode Sampling.....	53
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Analisis Data	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian	55
B. Dasar Hukum Masyarakat Lokal Melakukan Penambangan Pasir	56
C. Persepsi atau Pandangan Masyarakat Atas Kegiatan Penambangan Pasir	61
D. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Atas Kegiatan Penambangan Pasir	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	xiii
-----------------------------	-------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh Negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.¹

Hak menguasai tanah oleh negara tercantum dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam didalamnya semata-mata untuk menyejahterakan rakyat dengan memperhatikan aspek keadilan, bukan untuk orang tertentu tetapi rakyat banyak.

Penjabaran lebih jauh dari hak menguasai tanah oleh negara, terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

¹ Salim HS, 2006, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang berbunyi:

Ayat (1):

“atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Ayat (2):

“hak menguasai dari Negara termaksud dalam Ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

Aplikasi ketentuan di atas diserahkan kepada negara agar perencanaan, penataan, peruntukan, penggunaan, pemeliharannya, mengacu pada landasan hukum yang tunggal, sehingga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

Dalam tataran operasionalnya, hak-hak atas tanah tidak dapat diberikan untuk seluruh permukaan bumi di seluruh Indonesia, karena sejak tahun 1967 terjadi pemisahan beberapa sektor dari semula yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yakni ketika diterbitkan beberapa ketentuan sektoral seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pertambangan (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007) yang diharapkan sebagai undang-undang yang akan disinkronkan dengan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Di samping itu, sebagaimana di atur dalam pasal 14 UUPA bahwa terdapat pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah untuk kawasan tertentu berdasarkan rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaannya, baik yang disusun perencanaannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk:

- a. Untuk keperluan negara
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan
- d. Untuk keperluan mengembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan

- e. Untuk keperluan mengembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.

Perencanaan yang dimaksud menyediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan tersebut mengisyaratkan dilakukannya pengaturan terhadap daerah-daerah tertentu guna keperluan memperkembangkan usaha tersebut di atas. Salah satu daerah atau kawasan yang dapat disediakan untuk keperluan memperkembangkan usaha pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan dan untuk keperluan pembangunan lainnya tersebut adalah daerah atau kawasan sepanjang pantai.

pemakaian sebutan agraria dalam arti yang demikian luasnya, maka dalam pengertian UUPA Hukum Agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum Agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria, kelompok tersebut terdiri atas:²

1. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi
2. Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air

² Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, jakarta.hlm. 8.

3. Hukum Pertambangan yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksud oleh UU Pokok Pertambangan
4. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air
5. Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur dalam Ruang Angkasa (bukan “*space Law*”), mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi, yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memerhatikan kelestarian fungsi dan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.³

Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Pertambangan sumber daya alam harus dapat dikelola

³ Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 432.

dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan untuk masa mendatang. Pengelolaan pertambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, yang dilain pihak kurang memperhatikan sejumlah elemen dasar praktik pembangunan berkelanjutan, baik ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Namun, dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam lainnya, sebab pekerjaan penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan. Apabila penambangan selesai dilakukan, maka kegiatannya tidak berhenti sampai disitu. Pihak penambang berkewajiban untuk mengembalikan keadaan tanah seperti semula, dan tidak membiarkan tanah-tanah bekas penambangan yang berlubang-lubang begitu saja sehingga tanah-tanah tersebut tidak dapat

dimanfaatkan masyarakat dan berakibat akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.⁴

Keberadaan sektor pertambangan seperti penambangan pasir misalnya, sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable Resources*) sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan. Sektor pertambangan ini selain menghasilkan devisa (pemasukan) bagi negara dan daerah, juga merupakan sumber energi. Agar keberadaannya dapat bertahan lama maka sudah seharusnya pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana dan terencana sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam termasuk pemanfaatan lahan untuk penambangan pasir harus mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta segenap peraturan pelaksanaan lainnya.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, sebagian masyarakat lokal melakukan penambangan pasir di sepanjang aliran sungai dan tebing-tebing sungai dengan menggunakan alat-alat yang sederhana dan teknologi yang tidak begitu canggih, seperti skop

⁴ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.hlm. 16.

dibantu dengan alat muat keranjang rotan dan alat angkut perahu . Kegiatan penambangan pasir tersebut telah berlangsung selama 20 Tahun dan penguasaannya terjadi secara alamiah, akan tetapi penambang pasir tersebut dalam melakukan usahanya tanpa memiliki izin Usaha Pertambangan Rakyat yang di tegaskan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Awalnya masyarakat lokal melakukan kegiatan penambangan pasir karena melihat potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan demi kelangsungan hidup.

Akibat dari penambangan pasir yang dilakukan oleh sebagian masyarakat lokal tersebut menyebabkan tanah di sepanjang pinggiran sungai menjadi longsor, apabila musim hujan tiba akan terjadi banjir dan sungai meluap yang mengakibatkan persawahan dan pemukiman penduduk tergenang karena semakin melebarnya pinggiran sungai, jalan menuju pemukiman penduduk rusak akibat truk-truk yang mengangkut pasir, oleh karena itu masyarakat yang bermukim di sekitar daerah penambangan pasir merasa dirugikan dengan adanya kegiatan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Masyarakat lokal yang melakukan kegiatan penambangan pasir di daerah tersebut kurang memperdulikan masalah pelestarian fungsi

lingkungan hidup dan reklamasi lahan pasca eksploitasi serta dalam melakukan kegiatan penambangan harus memperhatikan sejumlah elemen dasar praktik pembangunan berkelanjutan, baik ekonomi, sosial dan lingkungan hidup serta memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

Masyarakat lokal hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memperhatikan kelayakan lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Gejala-gejala yang terjadi seperti yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa aktivitas usaha penambangan pasir kurang atau tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dengan adanya kenyataan seperti yang diuraikan diatas membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai dasar hukum penguasaan hak penambangan pasir oleh masyarakat lokal khususnya di Kecamatan Patalassang, Kabupaten Takalar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum bagi masyarakat lokal dalam melakukan penambangan pasir ?

2. Apakah harapan/pandangan dari masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar ?
3. Bagaimanakah kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Patallasang, Kabupaten Takalar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum masyarakat lokal dalam melakukan kegiatan penambangan pasir.
2. Untuk mengetahui harapan/pandangan masyarakat setempat terhadap kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar.
3. Mengetahui kebijakan pemerintah terrhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Patallasang, Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan referensi sekaligus sebagai bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan

ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan hukum keperdataan secara khusus dengan bidang hukum pertambangan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan khasanah ilmu pengetahuan bagi aparat pemerintahan dalam rangka menetapkan kebijakan dalam menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan hak penguasaan penambangan pasir, sekaligus sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian yang sama dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pertambangan

1. Pengertian Hukum Pertambangan

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Menurut Ensiklopedia Indonesia, Hukum pertambangan adalah :

“hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih – bijih dan mineral – mineral dalam tanah”

Salim HS mengatakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara dengan Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).⁵

Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini dilakukan pemerintah. Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi

⁵ Salim HS, *Op. cit.*, hlm. 8.

monopoli pemerintah semata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum tersebut.

Dari uraian di atas, ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi tersebut, yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam perusahaan bahan galian.

2. Asas-asas Hukum Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu bara telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu:⁶

a. Manfaat, Keadilan, dan Kesenambungan

Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan

⁶ Gatot Supramono, *Op. cit.*, hlm. 7.

penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan.

Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah.

Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan dan Berwawasan lingkungan

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

3. Aspek Hukum Pertambangan Rakyat

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B, bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Dilakukan oleh rakyat, maksudnya bahwa usaha pertambangan itu dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di area pertambangan rakyat. Sementara itu, tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Usaha pertambangan rakyat itu diusahakan secara sederhana. Maksud usaha sederhana adalah bahwa usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja. Jadi, tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih.

Dapat dikemukakan unsur-unsur pertambangan rakyat, yakni meliputi:⁷

a) Usaha pertambangan

⁷ Salim HS, *Loc. cit.*, hlm. 116.

- b) Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan galian C
- c) Dilakukan oleh rakyat
- d) Domisili di area tambang rakyat
- e) Untuk penghidupan sehari-hari
- f) Diusahakan sederhana

b. Kewenangan Memberikan IPR

Sesuai dengan namanya IPR maka pejabat yang berwenang memberikan izin tersebut adalah Bupati/Walikota (Pasal 67 UU No. 4 Tahun 2009). Bupati/Walikota hanya dapat memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan bupati/walikota kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara yang mengenal *delegering* atau pelimpahan wewenang pejabat atasan kepada pejabat bawahan. Oleh karena camat bertindak atas nama bupati/walikota untuk memberikan IPR kepada penduduk setempat. Untuk dapat memperoleh IPR tersebut, maka prosedurnya pemohon wajib menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada bupati/walikota. Meskipun

sudah ada pendelegasian wewenang kepada camat, namun permohonan IPR tetap ditulis kepada bupati/walikota setempat.⁸

Di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969, telah ditentukan prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan permintaan izin pertambangan rakyat. Untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada bupati/walikota dengan menyampaikan keterangan mengenai:

- a. Wilayah yang akan diusahakan;
- b. Jenis bahan galian yang akan diusahakan.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 sangat sederhana, persyaratan seperti itu juga dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat. Dalam permohonan penambang, rakyat cukup menyampaikan kepada bupati/walikota tentang wilayah yang akan diusahakan dan jenis bahan galian yang akan ditambang. Bahan galian yang akan ditambang meliputi bahan galian strategis, vital, dan bahan galian C.

c. Luas Wilayah Pemberian IPR

Adapun mengenai luas wilayah untuk pemberian IPR, ketentuan pasal 68 (1) UU No. 4 Tahun 2009 menyebutkan,

⁸ Gatot Supramono, *Loc. cit.*, hlm. 30.

bahwa luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) ha,
- b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha, dan/atau
- c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh)

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama.

a. Hak Pemegang IPR

Pemegang IPR sesuai pasal 69 UU No. 4 Tahun 2009 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 1) Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- 2) Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban pemegang IPR

Selain hak-hak di atas, pemegang IPR mempunyai kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal 60, yaitu :

- 1) Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan,
- 2) Mematuhi peraturan perundangan-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan,

pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku,

- 3) Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah,
- 4) Membayar iuran tetap dan iuran produksi, dan
- 5) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat juga wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan. Jadi selain wajib mengikuti aturan hukum, pemegang IPR wajib mengikuti aturan teknis pertambangan.

d. Pembinaan dan Pengamanan

Dalam melaksanakan usaha pertambangan, pemerintah tidak hanya memberikan izin saja, akan tetapi juga wajib melakukan pembinaan kepada yang diberi IPR. Untuk itu pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat, bangsa dan negara.

Disamping itu Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja

b. Pengelolaan lingkungan hidup dan

c. Pasca tambang

Untuk melaksanakan pengamanan teknis pertambangan, pemerintah kabupaten/kota diwajibkan mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu pelaksanaan di lapangan pemerintah kabupaten/kota kemudian membuat peraturan daerah (perda).⁹

Pengertian Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Prinsip pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 adalah satu IUP hanya diperbolehkan hanya untuk satu jenis tambang. Satu IUP diberikan untuk satu jenis mineral atau batu bara. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang.

Dapat pula dilihat hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan dibawah ini:¹⁰

- a. Hak Pemegang Izin Usaha Pertambangan:
 - 1. Memasuki wilayah izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan Peta dan Daftar Koordinat
 - 2. Melaksanakan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undang.
 - 3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP operasi produksi (konstruksi, produksi, pengangkutan dan

⁹ *Ibid*, hlm. 32.

¹⁰ Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 2013.

penjualan serta pengolahan dan pemurnian) di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi disetiap bagian atau beberapa bagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan produksi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan dalam WIUP
 5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan Asosiasi Mineral Utama yang diketemukan dalam WIUP
 6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan Asosiasi Mineral Utama yang diketemukan dalam WIUP
 7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Industri setelah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- b. Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan:
1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada
 2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada
 3. Melaporkan rencana investasi
 4. Menyampaikan rencana pasca tambang
 5. Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang)
 6. Menyampaikan RAKB selambat-lambatnya yang meliputi Rencana Tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur
 7. Menyampaikan laporan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 hari
 8. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan (6) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP akan diberikan peringatan tertulis
 9. Menyampaikan perencanaan dan pengembangan dan perdagangan masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB Bupati Takalar
 10. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan
 11. Membayar iuran tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

12. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan Perundang-Undangan
13. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
14. Menempatkan data jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai Perundang-Undangan
15. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab atas kegiatan IUP operasi produksi ((konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian), keselamatan, kesehatan kerja pertambangan serta pengelolaan lingkungan pertambangan
16. Menerapkan kaidah perambangan yang baik
17. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia
18. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala
19. Melaporkan dan menjaga fungsi dan daya dukung Sumber Daya Alam yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
20. Mengutamakan Pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
21. Mengikut sertakan seoptimal pengusaha local yang ada di daerah tersebut
22. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal/Negeri. Serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala/sewaktu-waktu apabila diperlukan
23. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah yang terganggu akibat kegiatan IUP eksplorasi
24. Kedalaman penambangan 4 meter untuk pencetakan empang dan kemiringan lereng harus sesuai dengan dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Kabupaten Takalar.

4. Pertambangan Pasir

Pemanfaatan lahan untuk penambangan pasir selalu dilakukan pada tanah yang telah dilindungi oleh UUPA, sedangkan penggalian itu sendiri sejak bergulirnya era otonomi daerah diatur

dengan izin dari pemerintah daerah melalui PERDA sesuai dengan asas desentralisasi. Dengan Pasal 14 UUPA telah ditegaskan tentang rencana umum kebijakan pemerintah dalam hal pengaturan pendayagunaan bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Adapun pengertian pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 adalah:

“sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan penambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

Penggolongan bahan galian diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:¹¹

- a. Bahan galian strategis
- b. Bahan galian vital, dan

¹¹ Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 44.

- c. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital.

Penggolongan bahan galian ini adalah didasarkan kepada:

- a. Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap negara
- b. Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (*genese*)
- c. Penggunaan bahan galian bagi industri
- d. Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak
- e. Pemberian kesempatan pengembangan perusahaan
- f. Penyebaran pembangunan di daerah.¹²

Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian ditentukan golongan bahan galian strategis (bahan galian A). Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan, yaitu:

- a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam
- b. Bitumen padat, aspal
- c. Antrasit, batu bara, batu bara muda
- d. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya
- e. Nikel, kobalt
- f. Timah

¹² Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian

Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B. Bahan galian vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu:¹³

- a. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan
- b. Bauksit, tembaga, timbal, seng
- c. Emas, platina, perak, air raksa, intan
- d. Arsin, antimon, bismuth
- e. Ytrium, rtutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya
- f. Beryllium, korundum, zircon, Kristal kwarsa
- g. Kriolit, fluorspar, barit
- h. Yodium, brom, klor, belerang

Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Bahan galian ini dibagi menjadi Sembilan golongan, yaitu:¹⁴

- a. Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk; HNO_3), pospat-pospat, garam batu (*halite*)
- b. Asbes, talk, mika, grafit magnesit
- c. Yarosit, leusit, tawas (*alum*), oker
- d. Batu permata, batu setengah permata
- e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit

¹³ Lihat Pasal 1 huruf b dan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian

¹⁴ Lihat Pasal 1 huruf c dan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian

- f. Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*)
- g. Marmer, batu tulis
- h. Batu kapur, dolomite, kalsit
- i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak megandung unsur mineral golongan A maupun B dalam jumlah berarti.

Berdasarkan penggolongan bahan galian diatas, dapat diketahui bahwa penambangan pasir termasuk bahan galian golongan C yakni bahan galian yang tidak termasuk golongan A (strategis) atau B (vital).

Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Pasir tidak dapat di tumbuhi oleh tanaman,karena rongga-rongganya yang besar-besar.¹⁵

Pasir yang bahannya berasal dari tanah yakni penggalian tanah tidak boleh melampaui lapisan bawah dari lapisan olah (kurang lebih 1,5 sampai 2 meter dibawah permukaan tanah). Apabila penggalian-penggaliannya ternyata menimbulkan gangguan-gangguan, kerusakan atau bahaya terhadap tanah milik lainnya

¹⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/pasir>

maka penggalian harus segera dihentikan, walaupun penggaliannya belum mencapai 1,5 meter.

Penambangan pasir pada prinsipnya bersifat industri dan bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah, pengelolaannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para pengusaha pertambangan pasir tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan usahanya karena hal ini diatur dengan tegas oleh undang-Undang.

B. Tinjauan Umum Penggunaan Tanah untuk Kepentingan Usaha Pertambangan

Untuk dapat melakukan usaha pertambangan sudah pasti dibutuhkan sebidang tanah karena kegiatan penambangan tidak lain adalah melakukan penggalian tanah. Keberadaan tambang kebanyakan letaknya berada di dalam perut bumi. Sebuah perusahaan pertambangan untuk dapat melakukan penambangan harus memiliki izin dari pemerintah lebih dahulu.

Dengan izin yang dimilikinya perusahaan pertambangan tidak dapat langsung melakukan penambangan sesuai lokasi yang ditunjuk dalam izin bersangkutan, akan tetapi perlu melihat dahulu di lokasi penambangan, apakah di lokasi tersebut terdapat hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain. Apabila ada hak-hak atas tanah maka tidak mungkin kegiatan penambangan dapat dilakukan begitu saja,

karena perusahaan pertambangan akan menghadapi masalah yaitu perbenturan kepentingan antara pengguna hak penambangan pada bidang tanah sama. Sementara itu pada umumnya hak atas tanah lebih dahulu diberikan pemerintah dibandingkan dengan hak penambangan.

1. Prinsip Hukum Agraria

Sebidang tanah merupakan bagian dari bumi yang letaknya berada pada bidang hukum agraria. Hukum agraria ruang lingkupnya sangat luas karena objek yang diatur adalah mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Bumi, air dan ruang angkasa, berasal dari karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekayaan nasional yang mempunyai fungsi sangat penting yaitu untuk membangun kemakmuran masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan itu dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bagi penguasaan negara atas agraria. Dikatakan penguasaannya berada pada negara, karena dari segi kedudukannya negara adalah sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan dari hak menguasai oleh negara untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan tujuan

tersebut, maka setidaknya-tidaknya perlu ada larangan–larangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu:¹⁶

- a. Apabila dengan itikad baik tanah-tanah telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh rakyat, maka kenyataan itu harus dihormati dan dilindungi. Keberadaaan rakyat di tanah-tanah tersebut merupakan salah satu penjelmaan dari tujuan kemakmuran rakyat. Rakyat harus mendapat hak didahulukan daripada *occupant* baru yang menyalahgunakan formalitas-formalitas hukum yang berlaku.
- b. Tanah yang dikuasai negara tapi telah dimanfaatkan rakyat dengan itikad baik (*ter goeder trouw*) hanya dapat dicabut atau diasingkan dari mereka, semata-mata untuk kepentingan umum, yaitu untuk kepentingan sosial dan atau kepentingan negara.
- c. Setiap pencabutan atau pemutusan hubungan hukum atau hubungan konkret yang diduduki atau dimanfaatkan rakyat dengan itikad baik, harus dijamin tidak akan menurunkan status atau kualitas hidup mereka karena hubungan mereka dengan tanah tersebut

Berdasarkan uraian diatas, maka semestinya makna dikuasai oleh negara mengandung arti sebagai berikut :

¹⁶ *ibid*, hlm. 172.

- a. Hak (negara) itu harus dilihat dari asas domain yang memberi wewenang kepada negara untuk melakukan tindakan kepemilikan yang bertentangan dengan asas kepunyaan menurut adat istiadat. Hak kepunyaan didasarkan pada asas komunal dan penguasa hanya sebagai pengatur belaka.
- b. Hak menguasai oleh negara tidak boleh dilepaskan dari tujuan yaitu demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara harus memberikan hak terdahulu kepada rakyat yang telah secara nyata dan dengan itikad baik memanfaatkan tanah.¹⁷

Hak menguasai dari negara kemudian diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) sebagai peraturan pelaksanaan di mana Pasal 2 Ayat (2) memberi wewenang kepada negara untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang, dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

¹⁷ *Ibid.*

Sejalan dengan itu mengenai yang menyangkut tanah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan Tanah-tanah Negara, menegaskan bahwa hak penguasaan berisikan:

- a. Merencanakan, peruntukan, penggunaan tanah tersebut
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk pelaksanaan tugasnya
- c. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan.

Dikuasai oleh negara tidak sama dengan yang dimiliki oleh negara, kesepakatan ini bertalian dengan atau suatu bentuk reaksi dari sistem atau konsep domain yang dipergunakan pada masa Kolonial Hindia Belanda. Konsep atau lebih dikenal dengan “*asas domain*” mengandung pengertian kepemilikan (*ownership*). Negara adalah pemilik atas tanah, karena itu mempunyai segala wewenang melakukan tindakan bersifat kepemilikan (*eigensdaad*).¹⁸

Sehubungan dengan hak menguasai oleh negara tersebut orang atau rakyat tidak bebas untuk menggunakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ruang angkasa. Bagi orang yang membutuhkan wajib meminta izin kepada negara/pemerintah. Pada prinsipnya pemerintah akan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 174

memberikan izin-izin tersebut sepanjang persyaratan-persyaratan atau prosedur yang ditetapkan telah dipenuhi.

2. Hak atas Pertambangan

Persoalan penambangan juga tidak dapat dilepaskan dari masalah agraria, karena sebagai mana pernah disinggung, kegiatan pertambangan berada di dalam bumi (tanah) dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Adapun mengenai hak-hak pertambangan, setelah seorang pengusaha memperoleh izin lingkungan, baru diberikan izin di bidang pertambangan yang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang merupakan hak-hak atas pertambangan.

3. Hubungan antara hukum pertambangan dengan Hukum Agraria

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum agraria. Ini erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pertambangan. Bagi perorangan maupun badan hukum yang akan melakukan penambangan pada wilayah pertambangan, yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status hukum tanah yang akan

digunakan, apakah statusnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan atau tanah negara.

Apabila tanah yang akan digunakan itu berstatus tanah hak milik, perusahaan pertambangan itu harus memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah. Ganti rugi itu tidak hanya terhadap tanah-tanah yang bersangkutan, tetapi juga terhadap benda-benda yang ada di atasnya, seperti tanaman, bangunan dan lain-lain. Begitu juga apabila tanah yang digunakan berstatus sebagai tanah negara, perusahaan/perorangan harus mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar dapat diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Permohonan hak guna bangunan erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan perkantoran pada lokasi itu. Begitu juga pemberian hak guna usaha, yaitu pemberian hak untuk mengusahakan tanah negara untuk kepentingan usaha pertambangan, yang meliputi usaha eksploitasi dan eksplorasi.

C. Tinjauan Umum Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

1. Hubungan Hukum Pertambangan dengan Hukum Lingkungan

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum

maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.¹⁹

Pelestarian lingkungan hidup mempunyai konotasi bahwa lingkungan hidup seharusnya dipertahankan sebagaimana keadaannya dalam proses pembangunan. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri bahwa pelestarian itu berasal dari kata lestari yang mempunyai makna langgeng, tidak berubah. Apabila kata lestari ini dikaitkan kepada lingkungan, maka berarti bahwa lingkungan itu tidak boleh berubah, tetap dalam keadaan aslinya. Padahal pembangunan berarti perubahan. Membangun adalah merubah sesuatu, untuk mencapai taraf yang lebih baik. Dengan demikian maka yang dilestarikan bukanlah lingkungan *an sich*. Akan tetapi kemampuan lingkungan. Kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang inilah yang perlu dilestarikan, sehingga setiap perubahan yang diadakan dalam proses pembangunan, selalu diupayakan untuk meniadakan atau mengurangi dampak negatifnya agar keadaan lingkungan menjadi serasi dan seimbang pada tingkatan yang baru. Istilah pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang membawa kepada keserasian antara pembangunan dan lingkungan, sehingga kedua

¹⁹ Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 12.

pengertian itu yaitu pembangunan dan lingkungan tidak dipertentangkan satu dengan yang lainnya.²⁰

Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan, karena dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan normal. Lingkungan hidup yang diartikan luas, yaitu tidak hanya lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antara berbagai aktivitas (usaha) dan semacamnya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Dengan demikian, jelas bahwa penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,

²⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, hlm. 98.

dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warga negara guna menuju tatanan masyarakat yang adil dan makmur dengan memerhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga pemanfaatannya dapat dilanjutkan oleh generasi yang akan datang. Oleh sebab itulah, pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa meninggalkan aspek pelestarian lingkungan hidup tersebut dikatakan sebagai pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Sehubungan dengan hal ini Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1993 mengemukakan sebagai berikut:

“dalam pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dikembangkan pola tata ruang yang menyerasikan tata guna lahan, air, serta sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis, serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi.....”²¹

Untuk mengendalikan pengelolaan lingkungan, dibentuk suatu badan yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan porsi kekuasaan institusi pengelola lingkungan. Badan ini disebut dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, disingkat Bapedal. Bapedal menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan yang meliputi

²¹ TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan dalam penyusunan kebijakan teknis dan program pengendalian dampak lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Kegiatan yang banyak mempengaruhi pencemaran atau rusaknya lingkungan hidup lebih banyak disebabkan oleh kegiatan-kegiatan industri dan pertambangan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan perindustrian dan pertambangan yang usahanya berdampak terhadap lingkungan, maka negara melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup mewajibkan setiap kegiatan industri dan pertambangan wajib memiliki izin lingkungan yang dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 35 UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang berbunyi:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Dengan izin lingkungan digunakan pemerintah untuk mengontrol perusahaan-perusahaan dalam menjalankan usahanya. Apabila di dalam menjalankan kegiatannya ditemukan pelanggaran izin lingkungan, maka akibatnya pemerintah akan

²² Lihat Pasal 1 dan 2 Keppres No. 196 Tahun 1998

menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan.

Berbicara mengenai implikasi Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berkaitan dengan penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup di tengah-tengah masyarakat. Misalnya penerapan atau implikasi praktik hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki pula peran yang sangat penting atas kelangsungan lingkungan hidup.²³

Hak-hak seseorang terhadap lingkungan hidup diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang. No. 32 Tahun 2009, sebagai berikut:

- a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

²³ Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 183.

- c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- d. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- f. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Adapun kewajiban-kewajiban seseorang terhadap lingkungan hidup dalam Pasal 67 Undang-Undang. No. 32 Tahun 2009 adalah :

- a. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 - 1) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

- 2) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- 3) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dalam Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) disebutkan bahwa perusahaan yang wajib memiliki izin lingkungan jika kegiatan/usahanya diwajibkan memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Adapun perusahaan yang wajib memiliki AMDAL adalah perusahaan yang usaha atau kegiatannya yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Dengan memiliki AMDAL digunakan perusahaan untuk mengurus penerbitan izin lingkungan.

Untuk dapat mengatakan bahwa suatu usaha perusahaan berdampak, maka ukuran-ukurannya ditentukan oleh Pasal 22 Ayat (2) UU PPLH, sebagai berikut:

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan,
- b. Luas wilayah penyebaran dampak berlangsung
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. Sifat kumulatif dampak

- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah suatu studi tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang diusulkan. Dalam hal ini studi yang dilakukan meliputi kemungkinan terjadinya berbagai macam perubahan, baik perubahan social-ekonomi maupun perubahan biofisik lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan yang diusulkan tersebut.

Selain daripada itu, AMDAL dapat juga diartikan sebagai suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan suatu keputusan. Oleh karena itu AMDAL bertujuan untuk menduga atau memperkirakan dampak yang mungkin timbul sebagai akibat suatu kegiatan atau proyek pembangunan yang direncanakan.

Hal penting yang harus diketahui sebelum melakukan AMDAL adalah rencana kegiatan yang ada serta keadaan lingkungan sebelum ada kegiatan. Keadaan lingkungan sebelum ada kegiatan harus diketahui terlebih dahulu sebagai patokan atau sebagai garis besar untuk mengukur pencemaran yang terjadi. Kalau rencana kegiatan tidak diketahui, begitupula garis dasar

tidak diketahui, maka akan sulit untuk mengukur dampak yang mungkin terjadi. Berdasarkan AMDAL yang dibuat untuk suatu kegiatan dapat dibandingkan keadaan sebelum ada kegiatan dan sesudah ada kegiatan, hasil yang ideal adalah apabila tidak terjadi dampak pencemaran lingkungan. Kalaupun terjadi suatu dampak, dampak tersebut hendaknya bersifat positif. Artinya, kegiatan tersebut memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat disekitarnya.

Semua data yang diberikan dalam AMDAL akan sangat membantu manakala terjadi pencemaran dampak lingkungan. Melalui AMDAL akan diketahui penyebab pencemaran, siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran lingkungan (bila ada) dan bagaimana cara penaggulangannya.²⁴

D. Penegakan Hukum dalam Kegiatan Pertambangan

1. Perizinan dalam Kegiatan Pertambangan

Di dalam kamus hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai “perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

²⁴ Wisnu Arya Wardhana, 2004, Dampak Pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi) , Penerbit Andi, Yogyakarta.hlm. 161.

Perizinan merupakan instrument hukum lingkungan yang mempunyai fungsi Preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan.²⁵

Sedangkan menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:²⁶

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.

²⁵ Sukanda Husin, 2009, *Penegakan hukum lingkungan Indonesia*, Jakarta, hlm. 95.

²⁶ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, hlm. 207.

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan "*sturen*") aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan)
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*drank en horecawet*", di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka setiap

orang atau perusahaan yang melakukan usaha dibidang apa saja wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah.

Izin lingkungan diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang U No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Oleh karena izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap perusahaan, maka izin tersebut sifatnya umum dan mutlak. Kewajiban tersebut dilatarbelakangi, karena negara atau pemerintah berkeinginan agar setiap perusahaan untuk bersungguh-sungguh memperhatikan lingkungan hidup supaya dapat dicegah atau diminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan. Perlindungan atau pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat serta perusahaan.

Pengaturan mewajibkan pengusaha wajib memiliki izin lingkungan karena pemerintah bermaksud serius untuk mengawasi lingkungan hidup dan ingin mewujudkan keadaan lingkungan hidup yang lebih baik dan lebih sehat ke masa depan. Izin lingkungan sebagai syarat utama yang wajib dimiliki perusahaan sebelum perusahaan memperoleh izin-izin lainnya yang diperlukan. Kedudukan izin lingkungan merupakan dasar untuk memperoleh izin usaha perusahaan, bahwa izin lingkungan

merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.

Pejabat yang berwenang menerbitkan izin lingkungan adalah menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkat kewenangannya (Pasal 36 Ayat (4) UU PPLH). Menteri lingkungan hidup untuk tingkat pusat, gubernur untuk tingkat provinsi, sedangkan bupati/wali kota untuk tingkat kabupaten/kota.

2. Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Pertambangan

Kebijakan adalah sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi, hal ini merupakan arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.²⁷

Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya yaitu:²⁸

1. Menurut Ealau dan Pewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.

²⁷ M. Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Reality Publisher. Surabaya. hlm. 334.

²⁸ <http://wahyudianto-eko.blogspot.com/2011/01/teori-kebijakan.html>.

2. Menurut Titmuss (1974), mendefenisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu.
3. Menurut Edi Suharto (2008), menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Selain tiga teori diatas kebijakan pun dapat didefenisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya, antara lain :

1. Teori kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktifitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.
2. Teori kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.
3. Teori elit memandang kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.
4. Teori rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.

5. Teori inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
6. Teori permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing.
7. Teori kebijakan yang lain adalah teori campuran yang merupakan gabungan modal rasional komprehensif dan inkremental.

Dalam bidang usaha pemanfaatan lahan untuk industri pertambangan, aparat pemerintah yang bertugas mengawasi dan membina usaha industri adalah pemerintah daerah sejalan dengan bergulirnya era otonomi daerah, seperti yang tercantum dalam Pasal 14 Huruf (J) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :

“Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk kabupaten/kota yakni pengendalian lingkungan hidup”

Masalah pengawasan dan pembinaan di bidang usaha industri khususnya usaha penambangan pasir, secara umum telah menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang penanganannya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan asas desentralisasi.

Selanjutnya kebijakan di bidang pengelolaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di atur dalam UUPA, kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat organik, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan menteri dan lain-lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Patalassang, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan daerah ini sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan adanya kenyataan bahwa di lokasi tersebut terdapat kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat lokal.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan maka penulis melakukan pengumpulan data dengan dua cara, yakni:

1. Metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah data dari dokumen, peraturan Perundang-Undangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung. Dalam metode ini penulis menempuh dua jalan, yaitu:
 - a. Wawancara (interview), yaitu mendapatkan keterangan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas. Dalam melaksanakan wawancara penulis

melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan mengenai objek penelitian, yaitu:

- 1) Responden dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang masyarakat yang melakukan penambangan pasir di daerah tersebut.
- 2) Narasumber adalah pejabat daerah setempat yang dapat memberikan informasi, dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah:
 - a) 1 (satu) orang aparatur dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar.
 - b) 1 (satu) orang aparatur dari kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar.
 - c) Camat Pattallassang
 - d) Tokoh masyarakat Kecamatan Patalassang
- b. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan penambangan pasir oleh masyarakat setempat di Kabupaten Takalar.

C. Teknik Metode Sampling

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi yaitu masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan pasir serta masyarakat setempat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya, sedangkan sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit yang diwawancarai. Jadi, sampel diharapkan benar-benar mewakili ciri-ciri suatu populasi. Adapun sampel dalam hal ini yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar daerah penambangan pasir di Kecamatan Pattalassang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan atau lokasi penelitian baik berupa wawancara langsung terhadap masyarakat setempat dan pejabat di lingkungan daerah Kabupaten Takalar.

2. Data sekunder yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah. Data sekunder ini sumbernya diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, karya ilmiah, surat kabar dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang telah dianggap valid selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk lebih mendapatkan gambaran nyata maka data kualitatif tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Kabupaten Takalar berada antara 5.3 – 5.33 derajat Lintang Selatan dan antara 119.22 – 118.39 derajat Bujur Timur. Kabupaten Takalar dengan ibukota Pattallassang terletak 29 km arah selatan dari Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah sekitar 566,51 km², di mana 240,88 km² diantaranya merupakan wilayah pesisir, pertanian, dan perkebunan.

Bagian Utara Kabupaten Takalar berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa, bagian selatan dibatasi oleh Laut Flores, sementara bagian Barat dibatasi oleh Selat Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pattallassang yang berada di sebelah selatan Kabupaten Takalar. Secara Geografis Kecamatan Pattallassang cukup strategis dengan luas wilayah 25,31 km². Kecamatan Pattallassang terbagi atas 8 (delapan) Kelurahan, yaitu kelurahan Pattallassang, Palantikang, Pappa, Maradekaya, Kalabbirang, Sombalabella, Bajeng, Sabintang.

Penduduk di Kecamatan Pattallassang memiliki mata pencaharian sebagai petani, selain itu adapula yang bekerja sebagai

Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, Buruh dan sebagai penambang pasir.

Secara administratif letak Kecamatan Pattallassang berbatasan dengan:²⁹

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Polongbangkeng Utara
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Polongbangkeng Selatan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mappakasunggu dan Mangarabombang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Lokasi penelitian terletak di sepanjang aliran sungai yang melintasi Kelurahan Pappa dan Maradekayya. Sungai tersebut dikenal dengan nama Sungai Pappa yang melintasi beberapa Kecamatan di Kabupaten Takalar.

B. Dasar Hukum Masyarakat Lokal Melakukan Penambangan Pasir

Berdasarkan sejarah, kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Pattallassang telah berlangsung sekitar tahun 1990, Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat lokal berada di Kelurahan Pappa dan Kelurahan Maradekaya, wilayah kelurahan ini berbatasan dengan sungai Pappa, kegiatan

²⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, Kecamatan Pattallassang dalam Angka, 2010

penambangan pasir tersebut dilakukan di sepanjang aliran sungai dan di tebing-tebing sungai.

awalnya masyarakat lokal melakukan penambangan pasir karena melihat potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut merupakan tuntutan ekonomi mengingat masyarakat di daerah ini tergolong ke dalam masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah ke bawah. Hal ini dapat diketahui dari kehidupan sehari-hari mereka, di mana tingkat pendidikan dan pekerjaan/penghasilan masih kurang bahkan ada masyarakat yang menjadikan kegiatan menambang pasir sebagai mata pencaharian utama.

Hak penambangan pasir masyarakat lokal terjadi secara alamiah, yakni pemerintah setempat mengetahui kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Hal tersebut diungkapkan oleh Dg. Bella yang merupakan Kepala Lingkungan di Kelurahan Pappa mengatakan bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut telah berlangsung secara turun temurun dan telah berlangsung kurang lebih 20 Tahun (Wawancara, Jumat 10 Agustus 2012).

Kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan di sepanjang aliran sungai pappa dan tebing-tebing sungai, penambang pasir menyelam ke dasar sungai untuk mengambil pasir dengan

menggunakan alat–alat yang sederhana dan teknologi yang tidak begitu canggih, seperti skop dibantu dengan alat muat keranjang rotan dan alat angkut perahu kecil yang disebut dengan *nipa-nipa*. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat lokal tersebut diketahui oleh pemerintah setempat. Namun dalam kegiatan pertambangan harus tetap memperhatikan berbagai aspek seperti lingkungan dan rencana tata ruang wilayah.

Dasar penguasaan para penambang pasir yakni penguasaan secara fisik yaitu penguasaan yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara objek/wilayah tambang dan penambang pasir. Namun dasar hukum penguasaan secara fisik saja tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, harus memiliki alas hak atau penguasaan secara yuridis yakni, hubungan tersebut ditunjukkan dengan adanya alas hak dari penguasaan objek yang dikuasai. Dalam hal ini penambang pasir harus mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan oleh pemerintah setempat seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Dalam hal pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Takalar dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Lokasi dari kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Pattallassang bisa ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) karena mempunyai

cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi sungai, hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang penambang pasir sebagai responden pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013, penulis memperoleh data sebagai berikut:

1. Rusli Dg. Rola umur 50 tahun, mata pencaharian utama sebagai penambang pasir dan telah melakukan kegiatan penambang pasir selama 20 Tahun yang merupakan penambang tetap di lokasi tersebut.
2. Dg. Lesse umur 27 Tahun, mata pencaharian utama sebagai penambang pasir dan telah melakukan kegiatan penambangan pasir selama 10 Tahun yang merupakan penambang tetap di lokasi tersebut. Pengambilan/penambangan pasir tersebut tidak dikenai pajak dari pemerintah setempat, Dg. Lesse hanya membayar sebesar Rp. 5.000,- kepada pemilik tanah untuk menimbun pasir yang telah ditambang untuk di angkut oleh truk.
3. Rahim umur 52 Tahun, mata pencaharian utama sebagai petani dan menambang pasir sebagai usaha sampingan. Rahim telah melakukan kegiatan penambang pasir selama 20 Tahun yang merupakan penambang tetap di lokasi tersebut. Menurut Rahim pembayaran pajak/retribusi pernah diberlakukan oleh Kepala Lingkungan, akan tetapi setelah Kepala Lingkungan di terganti

penarikan pembayaran pajak/redtribusi sudah tidak diberlakukan lagi.

4. Bakkara Dg. Sibali umur 50 Tahun, mata pencaharian utama sebagai petani dan menambang pasir sebagai usaha sampingan. Bakkara Dg. Sibali telah melakukan kegiatan penambang pasir selama 10 Tahun yang merupakan penambang tetap di lokasi tersebut. Bakkara Dg. Sibali membayar redtribusi kepada Kepala Lingkungan sebesar Rp. 5.000,- / truk.
5. Dg. Jalling umur 45 Tahun, mata pencaharian utama sebagai petani dan menambang pasir sebagai usaha sampingan. Dg. Jalling telah melakukan kegiatan penambang pasir selama 10 Tahun yang merupakan penambang tetap di lokasi tersebut dan membayar redtribusi kepada Kepala Lingkungan. Menurut Dg. Jalling aparat pemerintah dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Perindag Tamben) Kabupaten Takalar telah melakukan peneguran secara lisan terhadap kegiatan penambangan pasir tersebut akan tetapi para penambang pasir tidak mengindahkan teguran tersebut dan tetap melakukan kegiatannya.

Semua responden di atas tidak mengetahui bahwa pada dasarnya kegiatan penambangan pasir yang mereka lakukan adalah Pertambangan Rakyat yang di atur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara,

karena mereka tidak pernah diberikan sosialisasi oleh pemerintah sehingga para penambang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam melakukan kegiatannya. Hal ini harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah setempat agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga kelestariannya sehingga tidak berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan hidup dan tetap memperhatikan kondisi dan hak-hak masyarakat lokal yang melakukan kegiatan penambangan pasir.

C. Harapan atau Pandangan Masyarakat atas Kegiatan Pertambangan Pasir

Manusia dalam hidupnya mempunyai hubungan secara timbal balik dengan lingkungannya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup, dalam artian manusia dengan berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi kehidupan manusia.

Manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan

budayanya, akan tetapi ia nyaris lupa, bahwa ia sendiri sekaligus merupakan bagian dari alam, di mana ia hidup.³⁰

Menurut Kamus Hukum, pengertian masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sedangkan masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.³¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan H. Abdul Rahman Lajja yang merupakan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) beliau tidak setuju dengan adanya kegiatan penambangan pasir tersebut dikarenakan telah merusak lingkungan sekitar, yakni rusaknya jalan dan drainase akibat truk-truk pengangkut pasir, tanah di sepanjang pinggiran sungai menjadi longsor, dan bila musim hujan tiba akan terjadi banjir dan sungai meluap dan semakin melebarnya pinggiran sungai, beliau sangat berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah setempat dan segera menertibkan para penambang pasir (Wawancara, Senin 7 Januari 2013).

³⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, hlm. 4.

³¹ M. Marwan & Jimmy. 2009. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Reality Publisher. Surabaya. hlm. 424.

Dikuatkan pula oleh Muhammad Nur Dg. Tawang yang merupakan masyarakat di sekitar daerah penambangan pasir mengatakan bahwa awalnya Kepala Lingkungan tidak setuju dengan kegiatan penambangan pasir tersebut, akan tetapi karena menarik retribusi setiap truk yang mengangkut pasir akhirnya kepala lingkungan melakukan pembiaran terhadap kegiatan penambangan pasir tersebut.

Lebih jauh lagi dijelaskan oleh Dg. Bella yang merupakan Kepala Lingkungan di Kelurahan Pappa mengatakan bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut telah berlangsung lama secara turun temurun dan beliau selaku kepala lingkungan tidak dapat bertindak tegas terhadap kegiatan tersebut karena menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat lokal di daerah tersebut, bahkan menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian penambang pasir.

Menurut salah satu keluarga dari penambang pasir yang di wawancarai bahwa pemerintah setempat seharusnya lebih memperhatikan kondisi dan hak para penambang pasir, serta memberikan modal usaha bagi para penambang pasir di Kecamatan Pattallassang, mengingat minimnya penghasilan yang diperoleh dari kegiatan menambang pasir tersebut (Wawancara, Senin 7 Januari 2013).

Di satu sisi kegiatan penambangan pasir mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, namun di sisi lain kegiatan

penambangan pasir tersebut kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup, hal ini sesuai dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam penambangan mineral dan batu bara yakni secara terencana memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Dalam hal menyangkut masyarakat dan lingkungan hidup, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan seseorang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang. No. 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dan kesadaran para penambang pasir di Kecamatan Pattallasang dalam pengelolaan lingkungan hidup bukanlah hal yang mudah. Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan berbagai usaha yang semestinya dilakukan pemerintah setempat seperti misalnya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan para penambang pasir akan arti pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

D. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban atas Kegiatan Penambangan Pasir

Sebagaimana di atur dalam pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa terdapat pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah untuk kawasan tertentu berdasarkan rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaannya, baik yang disusun perencanaannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam kegiatan pertambangan, rambu-rambu yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

(Berdasarkan hasil wawancara Tanggal 9 Januari 2013) menurut Haeruddin selaku Kepala Bagian Pembangunan Kecamatan Pattallassang, bahwa lokasi pertambangan pasir di Kecamatan Pattallassang tidak termasuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar.

Selain itu, penulis juga mengadakan wawancara pada Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Perindag Tamben) Kabupaten Takalar, menurut Andi Jemma selaku Staf Bagian Pertambangan bahwa kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Pattallassang tersebut telah berlangsung sejak dulu dan turun temurun serta tidak memiliki izin dan para penambang pasir tidak pernah melakukan pengajuan Izin Pertambangan Rakyat. Dinas Perindag Tamben

Kabupaten Takalar juga telah melakukan peneguran secara lisan dan melakukan sosialisasi mengenai pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja kepada para penambang pasir akan tetapi para penambang pasir terkesan acuh bahkan tidak mengindahkan teguran dari pemerintah setempat (Wawancara, Rabu 9 Januari 2013).

Keberadaan sektor pertambangan seperti pertambangan pasir, sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan. Menurut Syahril selaku Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar bahwa dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksplotasi sumber daya alam lainnya, oleh karena itu sebagai kegiatan pertambangan rakyat, para penambang pasir mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap upaya pemulihan lingkungan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup (Wawancara, Kamis 10 Januari 2013)

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa para penambang pasir tidak melakukan kegiatan rehabilitasi pasca tambang dan kegiatan reklamasi berupa pemulihan lahan bekas tambang dan mempersiapkan lahan bekas tambang untuk pemanfaatan selanjutnya. Para penambang pasir hanya memasang bambu di bibir sungai sebagai penahan yang dimaksudkan agar tanah untuk menimbun pasir hasil tambang tidak longsor. Mereka tidak

mempedulikan dan memperhatikan bagaimana cara mengelola lingkungan hidup yang baik agar usaha pertambangannya tidak mengakibatkan atau meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan pada fungsi lingkungan hidup. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja sebab setiap seseorang memiliki kewajiban terhadap lingkungan hidup yang sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

Adapun yang menjadi alasan penyebab masyarakat lokal yang melakukan penambangan pasir kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan adalah:

- a. Faktor pendidikan yakni kurangnya pengetahuan, pemahaman dan tingkat pendidikan yang rendah para penambang pasir terutama di bidang hukum.
- b. Faktor ekonomi yakni para penambang pasir rata-rata berpenghasilan minim dan golongan menengah ke bawah, penghasilan yang diperoleh dari menambang pasir relatif minim sehingga mereka beranggapan bahwa usaha yang dilakukan tidak akan berdampak luas terhadap lingkungan sekitar.

Saat ini pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengelola sendiri daerah yang mereka kuasai (*asas desentralisasi*), sistem ini lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.³²

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Masalah pengawasan dan pembinaan di bidang pertambangan, secara umum telah menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang penanganannya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan *asas desentralisasi*.

³² Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 340.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C bahwa setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan “C” baru dapat dilakukan apabila telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan, Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan daerah, Koperasi, Badan Hukum Swasta, Pertambangan Rakyat, dan Perusahaan dengan modal bersama.³³

Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Takalar telah mengatur dan merencanakan setiap kegiatan pertambangan, yakni sebelum melakukan kegiatan pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan kegiatan penambangan pasir oleh masyarakat lokal di Kecamatan pattallassang di atur dalam Pertambangan Rakyat.

Menurut Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, bahwa Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan serta mengatur mengenai subjek dan objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dari hasil wawancara dengan 5 orang penambang pasir yang menjadi responden penelitian ini, semuanya mengatakan bahwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha pertambangannya

³³ Bagian Hukum Kantor Bupati Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 2013.

dalam hal ini Izin Pertambangan Rakyat karena kendala biaya dan berbagai persyaratan/berkas yang harus dilengkapi saat pengurusan izin tersebut dan setelah itu harus membayar pajak kepada pemerintah setempat, sedangkan hasil dari menambang pasir itu sendiri masih sangat minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masih lemah dan kurang tegasnya aparat pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam menegakkan dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada. Pihak pemerintah terkesan melepas begitu saja para penambang pasir dalam melakukan kegiatannya tanpa ada kontrol yang berkesinambungan.

Menurut Ilham Staf Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar dan Muhammad Haeruiddin Kepala Bagian Pembangunan Kecamatan Pattallassang menyatakan bahwa selama ini tidak melakukan tindakan yang tegas serta peringatan/sanksi kepada para penambang pasir tersebut karena faktor ekonomi dan minimnya penghasilan dari penambang pasir (wawancara, Kamis, 10 Januari 2013).

Pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah Kabupaten Takalar hendaknya melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Mempertimbangkan berbagai peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pertambangan, Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah, hak penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat lokal tetap harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah setempat karena kegiatan pertambangan tersebut telah berlangsung sejak dulu dan terus menerus sehingga tanpa disadari akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup di wilayah tersebut, serta memberikan peluang terhadap terjadinya kerusakan fungsi lingkungan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya para penambang pasir belum mengetahui bagaimana melakukan kegiatan penambangan yang baik dan benar yang penting bagaimana kebutuhan hidup tercukupi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dasar hukum penguasaan oleh masyarakat lokal atas kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di Kecamatan Pattallassang yakni penguasaan secara fisik yang terjadi secara alamiah dan turun temurun selama 20 Tahun. Akan tetapi, dasar hukum penguasaan secara fisik saja tidak cukup. dalam hal ini masyarakat yang melakukan penambangan pasir harus mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan oleh pemerintah setempat seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
2. Harapan/persepsi masyarakat di sekitar lokasi penambangan pasir yakni kegiatan penambangan pasir tersebut dapat segera dihentikan dan ditindak tegas oleh pemerintah setempat, sebab dari sisi lingkungan hidup sangat merugikan.
3. Pemerintah Kabupaten Takalar kurang tegas dalam menerapkan aturan-aturan yang dibuatnya yakni, PERDA No. 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan PERDA No. 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Hal ini disebabkan karena masyarakat lokal yang melakukan kegiatan penambangan pasir merupakan masyarakat ekonomi lemah dan hasil dari kegiatan menambang pasir itu sendiri masih sangat minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga terjadi “pembiaran” oleh pemerintah setempat.

B. SARAN

1. Pemerintah harus memperhatikan keadaan/kondisi masyarakat lokal yang melakukan kegiatan penambangan pasir, sehingga seharusnya ada kebijakan lebih responsive yang lebih memihak kepada masyarakat setempat, mengingat kegiatan penambangan pasir tersebut merupakan mata pencaharian utama sebagian masyarakat penambang pasir.
2. Perlunya dilakukan penyuluhan hukum mengenai pertambangan dan lingkungan hidup kepada masyarakat lokal yang melakukan penambangan pasir agar mereka mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara.
3. Pemerintah setempat tetap mendampingi dan memberikan arahan kepada para penambang pasir agar tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2009. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan: Jakarta.
- Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Djambatan: Jakarta.
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Garfika: Jakarta.
- Marwan dan Jimmy, 2009. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Reality Publisher: Surabaya.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Salim HS. 2006. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika: Jakarta.

Arya Wardhana, Wisnu. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah

Website:

_____, <http://id.wikipedia.org/wiki/pasir>, diakses pada tanggal 14 Juni 2012

_____, <http://wahyudianto-eko.blogspot.com/2011/01/teori-kebijakan.html>, diakses pada tanggal 7 Februari 2013



LAMPIRAN



YAMINA JAYA
Photocopy & Printing
KANTIN RAMSIS UNHAS
Phone: 081342933050



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Urip Sumohardjo No. 269 Telp. 436936-436937 FAX. 436934
Makassar (90231)

Makassar, 27 November 2012

Nomor : 070.5.1/1353/Balitbangda
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada

Yth. Bupati Takalar

di-
Takalar

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar nomor : 8840/UN4.6.3/PL.02/2012 tanggal 22 November 2012 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : Ayatul Asmaul Husna
Nomor Pokok : B111 08 392
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. P. kemerdekaan Km. 10 , Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis, dengan judul :

"HAK PENAMBANGAN PASIR OLEH MASYARAKAT LOKAL DI KECAMATAN PATTALLASSANG KAB. TAKALAR"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 30 November s/d 30 Desember 2012

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab./Kota;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulsel.Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

KEPALA BADAN
Kabid Data dan Publikasi
Ir. Rajendra
Pangkat Pembina Tk I
NIP. 19630403 199103 1 003

TERBUKAN : Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar;
3. Kepala Badan Lintas Kabupaten dan Kota Prov. Sulsel;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jl. H. Ince Husain Dg. Parani No. 63 Takalar
Telp./ Fax. 0418 – 21089 Kode Pos 92211

SURAT KETERANGAN

No. **22** /P3E - UMUM /I/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. PARAWANGSA, M.Si
NIP : 19691216 199112 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina TK.I, IV/b
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindag Tamben Kab. Takalar

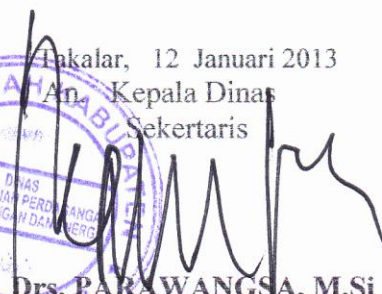
Berdasarkan surat Pembantu Dekan III, Nomor : 8840/UN4.6.3/PL.02/2012 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

” HAK PENAMBANGAN PASIR OLEH MASYARAKAT LOKAL DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR ”

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini telah melakukan Penelitian di Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kab. Takalar mulai tanggal 12 Desember 2012 s/d 14 Januari 2013.

Nama : Ayatul Asmaul Husna
Tempat, Tanmggal Lahir : Makassar, 15 Juni 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan 10 No. 11 Makassar

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 12 Januari 2013
An. Kepala Dinas
Sekertaris

Drs. PARAWANGSA, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19691216 199112 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

KECAMATAN PATTALLASSANG

Jln. Diponegoro Nomor 49 Telepon No. (0418) 21780
TAKALAR KODE POS 92221

SURAT KETERANGAN

Nomor 070/02/BKPL/II/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budiar Rosal Saleh. S.STP
NIP : 19800520 199810 1 001
Pangkat : Penata Tingkat I
Jabatan : Kepala Kecamatan Pattallassang

Berdasarkan surat kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Takalar Nomor: 070/729//BKPL/XII/2012, tentang Izin Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul:

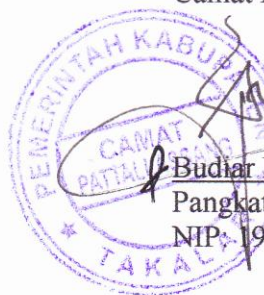
“ HAK PENAMBANGAN PASIR OLEH MASYARAKAT LOKAL DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR”

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini telah melakukan Penelitian di Kecamatan Pattallassang mulai Tanggal 12 Desember 2012 s/d 09 Januari 2013.

Nama : Ayatul Asmaul Husna
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 15 Juni 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : mahasiswa
Alamat : Jl. Perintis kemerdekaan 10 No. 11, Makassar

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 09 Januari 2013
Camat Pattallassang,



Budiar Rosal Saleh. S.STP
Pangkat: Penata Tk. I
NIP. 19800520 199810 1 001